

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- BPS Sulawesi Selatan. (2023). *Profil Kabupaten Bone 2023*. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan
- Djaenuri, A. (2015). Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah. *Repository.Ut.Ac.Id*, 3.
- Dunn, W. N. (2004). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.
- Elliott, Lorraine. *Environmental challenges, policy failure and regional dynamics in Southeast Asia*. na, 2009.
- Fauziah, H. U., Suhartono, E., & Pudjantoro, P. (2021). Implementasi penguatan pendidikan karakter religius. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(4). <https://doi.org/10.17977/um063v1i4p437-445>
- Haiyanta, (1997), *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*, Jakarta, Badan Pendidikan dan Penelitian Departemen Dalam Negeri.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2021). Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif & kualitatif. *Metode Penelitian Bisnis Bandung*.
- ICRAF (International Centre for Research in Agroforestry). (2020). *Annual Report 2020: Collaborations for Sustainable Environmental Solutions*. International Centre for Research in Agroforestry.
- ICRAF. (2022). *ICRAF Annual Report 2022: Enhancing Collaboration for Sustainable Landscapes*. International Centre for Research in Agroforestry. <https://www.icraf.org>

- International Union for Conservation of Nature (IUCN). (2021). *Collaboration between Government and Research Institutions for Environmental Sustainability in Indonesia*. IUCN. <https://www.iucn.org>
- Kementerian PPN/BAPPENAS. (2022). *Laporan Kerjasama Pembangunan Berkelanjutan Indonesia dan Mitra Internasional 2022*. Kementerian PPN/BAPPENAS.
- Leontinus, G. (2022). PROGRAM DALAM PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs) DALAM HAL MASALAH PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA. *Jurnal Samudra Geografi*, 5(1). <https://doi.org/10.33059/jsg.v5i1.4652>
- Maulida. (2020). TEKNIK PENGUMPULAN DATA DALAM METODOLOGI PENELITIAN. *Darussalam*, 21.
- Perdinan, P. (2020). PERUBAHAN IKLIM DAN DEMOKRASI: KETERSEDIAAN DAN AKSES INFORMASI IKLIM, PERANAN PEMERINTAH, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG IMPLEMENTASI ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.87>
- Primawanti, H., Dermawan, W., & Ardiyanti, W. (2019). Kerjasama Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema Sister City. *Journal of Political Issues*, 1(1), 10–22. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.3>
- Safitri, U., Nuarizal, A., & Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1). <https://doi.org/10.29210/3003818000>

- Salmaa. (2022). *Pengertian, Isi, dan Contoh Fokus Penelitian*. Deepublish.
- Santoso, T. B. (2019). Peran Kerjasama Internasional dalam Pengelolaan Lingkungan Berbasis Agroforestry di Indonesia. *Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)*
- Saryono, M. D. A., & Devianty, R. (2016). Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Judul Penelitian Dan Teori Dalam Penelitian Kualitatif. *Raudhah*, 4(1).
- Sharkansky, I. (1970). Analisis kebijakan dalam ilmu politik. Markham Pub. Co
- Sibarani, R. (2017). Tantangan Tata Kelola Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia (Studi Kasus: Komparasi Antara Penerapan Desentralisasi dan Multi-Level Governance). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(1).
<https://doi.org/10.38011/jhli.v4i1.50>
- Sudirman. (2021). Konsep pemerintahan. *Jurnal Terapan Pemerintahan*, 1(2).
- Sugandi, M., & Haryanto, S. (2020). *Agroforestry as a Sustainable Land Use Practice: The Case of Sulawesi Province, Indonesia*. *Environmental Sustainability Journal*, 16(2), 50-64.
- Sumodiningrat, G. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial, P.T.Gramedia PustakaUtama, Jakarta.
- Vinaya, N. L., Prasetyo, T., & Harisyana, T. M. (2021). Analisis Penerapan Standar Resep dan Kualitas Makanan di Pizza Marzano Kota Kasablanka. *Management & Accounting Expose*, 2(1).
<https://doi.org/10.36441/mae.v2i1.94>
- Zakiyya, A., & Purnama, C. (2022). Pembangunan Infrastruktur di Indonesia dalam Kerja Sama Indonesia-Tiongkok tahun 2010-2018. *Padjadjaran*

Journal of International Relations, 4(2).

<https://doi.org/10.24198/padjir.v4i2.39364>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10, MAKASSAR 90245
TELEPON (0411) 586200, (6 SALURAN), 584200, FAX (0411) 585188
Laman: www.unhas.ac.id

Nomor : 02098/UN4.8.7/PT.01.04/2024
Perihal : Izin Melakukan Penelitian

9 Oktober 2024

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Tempat

Dengan Hormat kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang tersebut berikut ini :

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Muhammad Fadli Hasri	E051211043	Sarjana Ilmu Pemerintahan

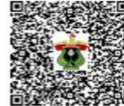
Bermaksud untuk melakukan penelitian lapangan/kepuustakaan dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE DENGAN INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN AGROFORESTRY (ICRAF) DALAM BIDANG LINGKUNGAN."

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon agar mahasiswa yang bersangkutan diberikan izin untuk mendapatkan data/informasi yang berguna bagi penyusunan tugas tersebut.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan,



Prof. Dr. Hasniati, S.Sos., M.Si.
NIP. 196801011997022001

Tembusan:

- 1 Dekan FISIP UNHAS.
- 2 Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS.
- 3 Sekretaris Departemen Ilmu Pemerintahan FISIP UNHAS.
- 4 Kepala Bagian Tata Usaha FISIP UNHAS.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 26618/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 lembar	Tertampir
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar Nomor : 02098/UN4.8.7/PT.01.04/2024 tanggal 09 Oktober 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUHAMMAD FADLI HASRI
Nomor Pokok	: E051211043
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km 10, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA BILATERAL PROVINSI SULAWESI SELATAN DAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONE DENGAN INTERNATIONAL CENTRE FOR RESEARCH IN
AGROFORESTRY (ICRAF) DALAM BIDANG LINGKUNGAN "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 23 Oktober s/d 02 Desember 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Oktober 2024

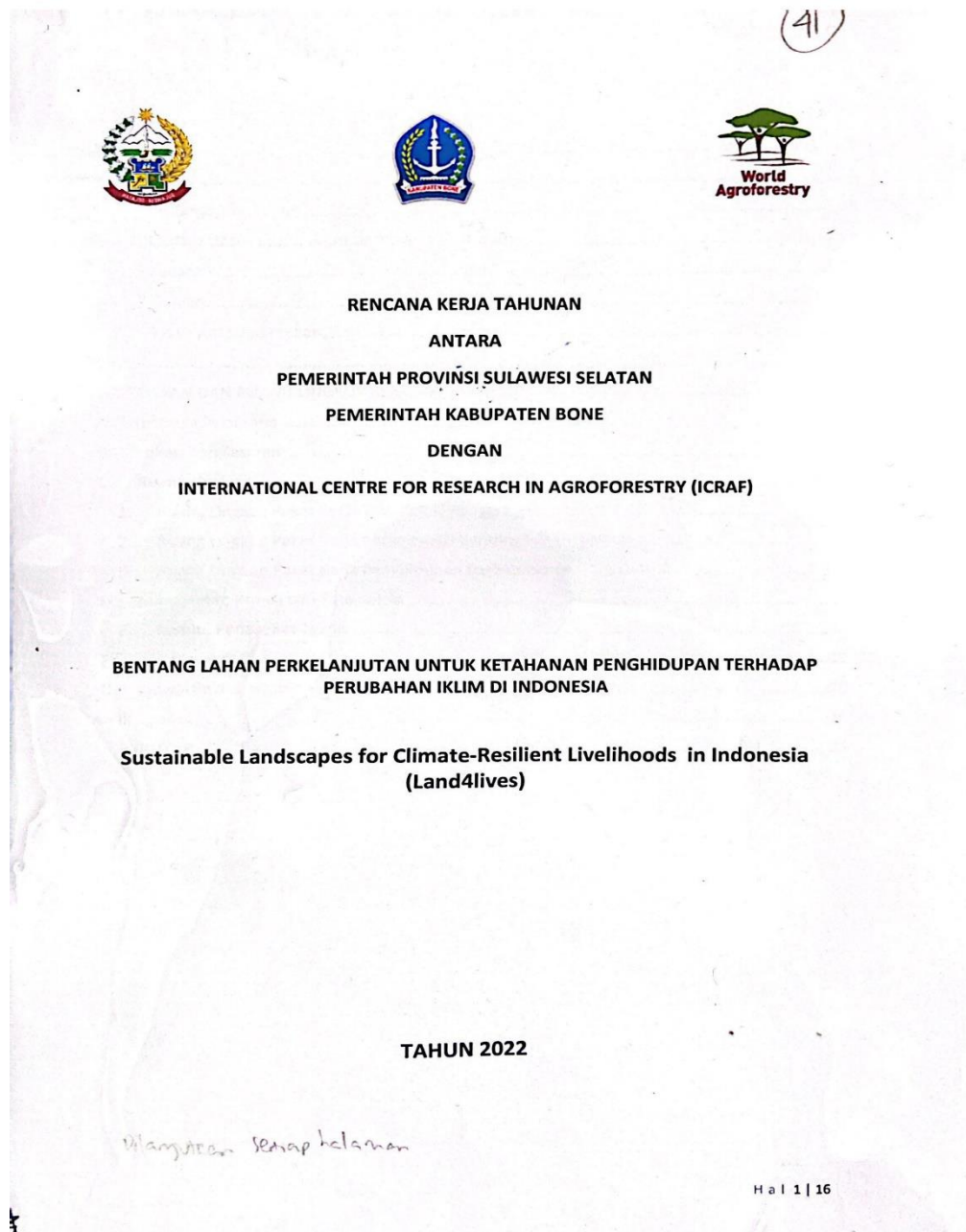
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP Univ. Hasanuddin Makassar di Makassar;
2. Bertinggal

Lampiran 2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)



Contents

BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Sasaran dan Tujuan Rencana Kerja Tahunan.....	3
1. Sasaran	3
2. Tujuan.....	4
3. Hasil yang diharapkan	4
BAB II	5
PELAKSANAAN DAN RUANG LINGKUP RENCANA KERJA TAHUN	5
A. Institusi Pelaksana	5
B. Lokasi dan Sasaran	5
C. Ruang Lingkup	5
1. Ruang Lingkup Paket Kerja Tata Kelola Penggunaan Lahan (WP-1).....	6
2. Ruang Lingkup Paket Kerja Manajemen Bentang Lahan (WP-2).....	7
3. Ruang Lingkup Paket Kerja Penghidupan Berketahanan Iklim (WP-3)	8
D. Manajemen Projek dan Tata Kelola	9
E. Komite Penasehat Teknis	10
F. Pembiayaan.....	10
G. Jadwal Pelaksanaan.....	10
BAB III	11
PENUTUP	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Degradasi lingkungan yang terus berlanjut di Indonesia telah mempengaruhi 50-60 juta orang Indonesia yang bergantung pada ekosistem alami untuk mata pencaharian dan ketahanan pangan mereka. Selain itu, perubahan iklim yang diproyeksikan akan memengaruhi produktivitas pertanian, memberikan dampak serius pada petani kecil yang bergantung pada tanaman subsisten dan komersial. World Agroforestry (ICRAF) bersama dengan Global Affairs Canada (GAC) saat ini sedang memulai persiapan pelaksanaan kegiatan proyek berjudul *Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives)*. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat kapasitas komunitas rentan, termasuk didalamnya perempuan dan anak-anak perempuan, untuk dapat melakukan upaya mitigasi, meningkatkan ketahanan, sekaligus beradaptasi dengan dampak buruk dari perubahan iklim, melalui partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan lingkungan dan komunitas. *Land4Lives* akan diimplementasikan di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Selatan. Melalui implementasi *Land4Lives*, diharapkan akan tercipta peningkatan kualitas penghidupan, ketahanan pangan, mata pencaharian dan ekonomi lokal yang tahan perubahan iklim, terutama bagi kelompok rentan, termasuk didalamnya perempuan dan anak perempuan di Indonesia. *Land4Lives* menargetkan pengelolaan bentang lahan yang baik melalui kerja sama dengan petani untuk mengurangi terjadinya deforestasi, menjaga ekosistem alami, mengurangi kerentanan iklim, dan meningkatkan mata pencaharian. *Land4Lives* akan mempromosikan solusi berbasis alam melalui sistem pertanian dan pangan yang tanggap iklim, serta pengelolaan lahan dan air yang komprehensif. Proyek ini juga akan berfokus pada pengarusutamaan kesetaraan gender dalam mendukung pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan serta akses ke pasar. Salah satu caranya adalah dengan menggalakkan *agroforestry*/wanatani untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

B. Sasaran dan Tujuan Rencana Kerja Tahunan

1. Sasaran

Sasaran dari Rencana Kerja Tahunan ini yaitu terselenggaranya program *Land4Lives* di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Bone dengan kerja sama yang efektif berbagai pihak.

2. Tujuan

1. Penguatan tata kelola penggunaan lahan dan pembuatan kebijakan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang bermanfaat bagi masyarakat tertinggal dan rentan pada beberapa provinsi di Indonesia utamanya di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone serta mengurangi resiko dari emisi gas dari sector lahan (Paket Kerja 1).
2. Perbaikan pengelolaan bentang lahan oleh para pihak pengelola dan pengguna lahan dalam menjaga fungsi dan jasa lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik kaum wanita maupun pria pada bentang lahan yang menjadi focus proyek (Paket Kerja 2).
3. Peningkatan penghidupan dan ketahanan pangan secara cerdas iklim bagi masyarakat tertinggal dan rentan terutama kaum wanita (Paket Kerja 3).
4. Koordinasi, Kemitraan, Akuntabilitas, Komunikasi dan Knowledge management (Paket kerja 4).

3. Hasil yang diharapkan

1. Menguatnya tata kelola penggunaan lahan dan pembuatan kebijakan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang bermanfaat bagi masyarakat tertinggal dan rentan pada beberapa provinsi di Indonesia utamanya di Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone serta mengurangi resiko dan emisi gas dari sector lahan.
2. Terselenggaranya perbaikan pengelolaan bentang lahan oleh para pihak pengelola dan pengguna lahan dalam menjaga fungsi dan jasa lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, baik kaum wanita maupun pria pada bentang lahan yang menjadi focus proyek.
3. Meningkatnya penghidupan dan ketahanan pangan secara cerdas iklim bagi masyarakat tertinggal dan rentan terutama kaum wanita.
4. Terlaksananya koordinasi, kemitraan, akuntabilitas komunikasi dan knowledge management,

BAB II

PELAKSANAAN DAN RUANG LINGKUP RENCANA KERJA TAHUN

A. Institusi Pelaksana

Rencana Kerja tahunan (RKT) antara ICRAF-World Agroforestry dengan Pemerintah provinsi Sulawesi selatan dan Pemerintah kabupaten Bone ini akan diimplementasikan oleh iCRAF dengan beberapa mitra pelaksana proyek yaitu CIFOR, mitra politis yaitu BAPPENAS dalam hal ini direktorat pangan dan pertanian, mitra strategis yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta sub kontraktor local NGO dan universitas.

B. Lokasi dan Sasaran

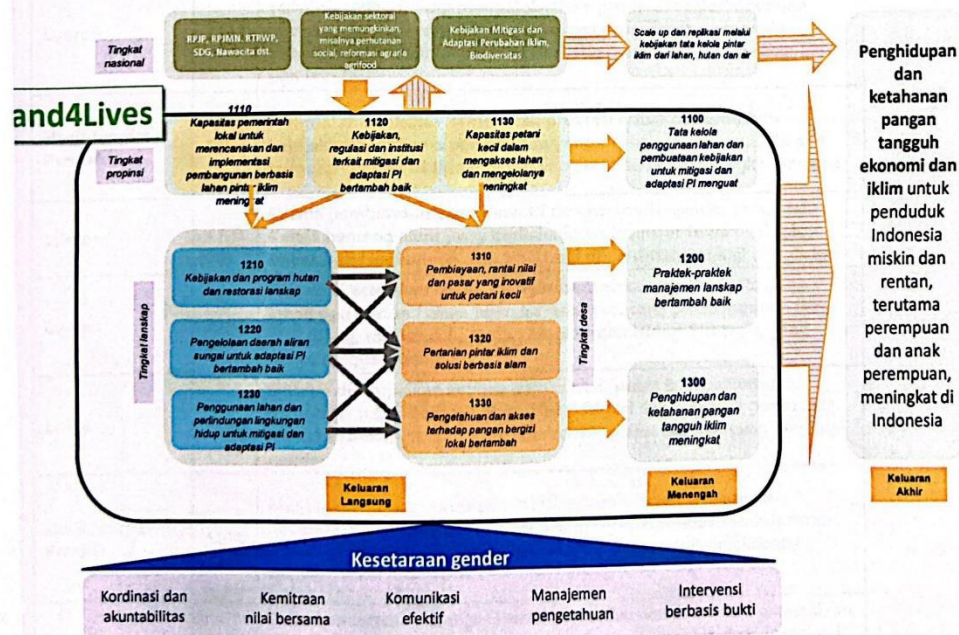
Lokasi pelaksanaan yaitu : kabupaten Bone dan kota Makassar

Sasaran dan target sebagai berikut :

- Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan
- Pemerintah kabupaten Bone
- Komunitas petani di Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae

C. Ruang Lingkup

Cakupan ruang lingkup untuk rencana kerja tahunan (RKT) secara garis besar :



1. Ruang Lingkup Paket Kerja Tata Kelola Penggunaan Lahan (WP-1)

Tingkatan Sasaran	Kode	Capaian dan Kegiatan
Hasil Jangka Menengah	1100	Menguatnya tata kelola penggunaan lahan dan perumusan kebijakan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan rentan di provinsi terpilih di Indonesia, serta mengurangi emisi dari penggunaan lahan, alih guna lahan dan hutan (LULUCF)
Hasil Jangka Pendek	1110	Penguatan kapasitas pemerintah lokal untuk merencanakan dan menerapkan solusi-solusi berbasis alam untuk membangun skema tata guna lahan yang cerdas-iklim, pembangunan yang pro-masyarakat miskin, serta pengelolaan bentang alam dan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan dan tanggap gender di tingkat provinsi
Luaran	1111	Meningkatnya ketersediaan perangkat teknis yang mencakup rencana tata ruang dan pembangunan yang mengarah pada ketahanan pangan, pertanian cerdas-iklim, dan pemberdayaan perempuan
Luaran	1112	Pelatihan dan pendampingan teknis disediakan untuk aparat pemerintah perempuan dan laki-laki, serta anggota dari lembaga mitra dalam hal perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program yang setara gender
Luaran	1113	Dihasilkannya rencana tata guna lahan yang inklusif, terintegrasi dan terinformasikan, yang mengalokasikan produksi vs perlindungan kawasan, menuju mitigasi dan adaptasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari kelompok perempuan dan laki-laki
Hasil Jangka Pendek	1120	Penguatan kapasitas pemerintah provinsi untuk merumuskan kebijakan dan skema pembiayaan yang pro-masyarakat miskin dan tanggap-gender di tiga provinsi yang sejalan dengan tingkat nasional
Luaran	1121	Skema pembiayaan yang inovatif dan responsif-gender untuk tata Kelola bentang alam yang berkelanjutan (transfer fiskal ekologis, Imbal Jasa Lingkungan, dsb.) berhasil diidentifikasi, dikaji dan diakses
Luaran	1122	Advokasi kebijakan untuk mengarusutamakan rencana tata guna lahan dan pertumbuhan hijau ke dalam rencana pembangunan dan tata ruang, termasuk ke Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang isinya tanggap-gender
Luaran	1123	Sintesis disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan mengenai solusi berbasis alam atas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pertanian cerdas-iklim, dan rencana aksi pangan yang tanggap-gender
Hasil Jangka Pendek	1130	Meningkatnya kapasitas pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan di tingkat nasional dalam mendiseminasikan informasi dan pengetahuan yang akan memperbaiki bentuk pengelolaan bentang alam oleh petani
Luaran	1131	Pelatihan untuk aparat pemerintah provinsi untuk mengorganisasikan dan mendiseminasikan pengetahuan dan informasi mutakhir melalui platform komunikasi terkait akses lahan bagi masyarakat

Luaran	1132	Lokakarya untuk pengelola lahan, khususnya petani perempuan dan laki-laki, mengenai diseminasi informasi mengenai akses lahan, yaitu perhutanan sosial, reforma agrarian dan skema lainnya
Luaran	1133	Pelatihan tanggap-gender untuk LSM dan kelompok masyarakat, sejalan dengan program pemerintah, yang mengambil upaya meng-ases kerentanan masyarakat pedesaan terhadap perubahan iklim dan langkah-langkah untuk meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim

2. Ruang Lingkup Paket Kerja Manajemen Bentang Lahan (WP-2)

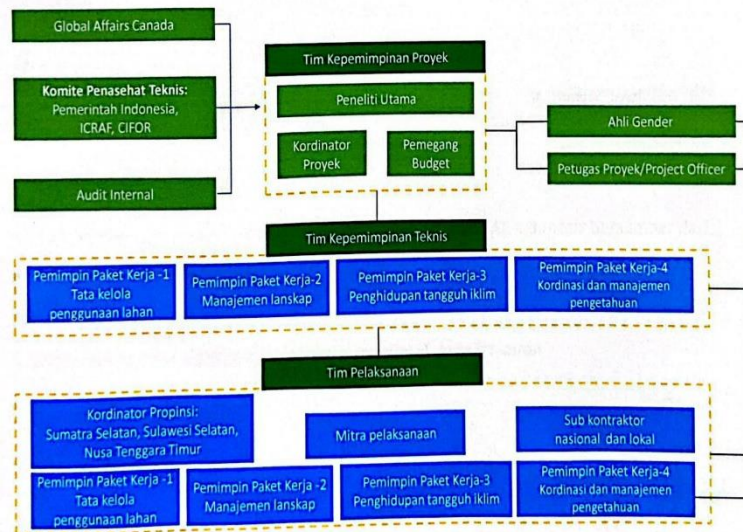
Tingkatan Sasaran	Kode	Capaian dan Kegiatan
Hasil Jangka Menengah	1200	Terbenahinya pengelolaan di tingkat bentang alam oleh pengelola lahan dan pengguna lahan, yang berorientasi pada kesehatan ekosistem yang lebih baik dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda dari perempuan dan laki-laki di bentang alam prioritas di provinsi-provinsi terpilih
Hasil Jangka Pendek	1210	Meningkatnya keinginan untuk mengembangkan kebijakan dan program restorasi hutan dan bentang alam yang dapat membuka partisipasi dari kelompok rentan, khususnya perempuan
Luaran	1211	Area prioritas untuk perlindungan, produksi dan restorasi hutan dan bentang alam diidentifikasi dan dipetakan melalui proses yang partisipatif dan setara gender
Luaran	1212	Asesmen setara-gender terkait dengan perangkat dan pilihan untuk menghindari deforestasi dan degradasi lahan dan hutan, termasuk investasi hijau untuk komoditas yang dikelola secara setara oleh perempuan dan laki-laki
Luaran	1213	Panduan implementasi restorasi hutan dan bentang alam dengan pendekatan setara gender direkomendasikan kepada pemerintah provinsi
Hasil Jangka Pendek	1220	Meningkatnya kesadaran akan sumber air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di antara perempuan dan laki-laki untuk 6 bentang alam terpilih
Luaran	1221	Analisis fungsi DAS, kapasitas penyangga, potensi ancaman dari erosi tanah, sedimentasi, longsor dan banjir melalui konsultasi dengan perempuan dan laki-laki
Luaran	1222	Perancangan bersama (co-design) yang setara gender mengenai infrastruktur hijau dan solusi berbasis alam, penggunaan air yang efisien, retensi karbon, konservasi keanekaragaman hayati dan tanah di bentang alam prioritas
Luaran	1223	Pelatihan dan fasilitasi yang setara-gender disediakan untuk pemerintah lokal, sektor swasta, kelompok petani dan kelompok yang rentan untuk pemanenan air hujan secara efisien dan solusi berbasis alam

3. Ruang Lingkup Paket Kerja Penghidupan Berketahanan Iklim (WP-3)

Tingkatan Sasaran	Kode	Capaian dan Kegiatan
Luaran	1311	Kasus-kasus bisnis berbasis wanatani yang inovatif dan terintegrasi, dengan perhatian khusus pada usaha yang dipimpin oleh perempuan atau untuk komoditas yang dikelola oleh sebagian besar perempuan, termasuk kemitraan barbagi-nilai dengan sektor swasta
Luaran	1312	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani, khususnya perempuan dan kelompok yang dipimpin perempuan, khususnya terkait akses terhadap instrumen pembiayaan inovatif
Luaran	1313	Pengembangan pendanaan inovasi yang fokus secara lokal (asuransi panen dan pasar) untuk para petani, khususnya perempuan dan kelompok perempuan
Hasil Jangka Pendek	1320	Meningkatnya pengetahuan rumah tangga tani, khususnya rumah tangga miskin dan yang dikepalai perempuan, atas pertanian cerdas-iklim
Luaran	1321	Dihasilkannya materi-materi sensitif gender terkait Good Agricultural Practice (GAP) dari komoditas wanatani untuk petani perempuan dan laki-laki
Luaran	1322	Plot demonstrasi dari pertanian cerdas-iklim dan tanggap gender, termasuk wanatani dan paludikultur, yang dibangun bersama dan untuk petani perempuan dan laki-laki
Luaran	1323	Lokasi demonstrasi di hutan dan lahan gambut yang dikelola bersama oleh petani perempuan dan laki-laki, pemerintah, dan LSM
Hasil Jangka Pendek	1330	Meningkatnya pengetahuan tentang sumber pangan lokal yang sehat dan bergizi, serta meningkatnya asupan gizi untuk semua anggota masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak
Luaran	1331	Kampanye penyadartahuan yang sensitif gender dan usia terkait dengan pangan dan pola konsumsi sehat, serta akses setara dari sistem produksi pangan lokal
Luaran	1332	Disediakannya pendampingan teknis, khususnya untuk rumah tangga dari kelompok yang secara sosio-ekonomi tidak diuntungkan, untuk membahas hambatan dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi
Luaran	1333	Difasilitasinya pengembangan program pemerintah yang setara gender untuk secara efektif menyentuh isu-isu ketahanan pangan dan gizi yang memperhatikan aspek diferensiasi gender

D. Manajemen Proyek dan Tata Kelola

Land4Lives akan dipimpin dan dilaksanakan oleh ICRAF Indonesia. Di bawah pimpinan Indonesia Country Director. Tim Kepemimpinan Proyek (TKP) terdiri dari 1) Peneliti Utama (PU); 2) Kordinator Proyek (KP); dan 3) Pemegang Budget (PB). TKP akan melaporkan langsung kepada ICRAF Indonesia Country Director. Dalam TKP, PU akan memantau pendekatan pelaksanaan proyek, termasuk kemitraan dan kerja sama strategis. KP dan PU akan bekerja sama guna memastikan semua sasaran proyek tercapai sesuai rencana. KP bertanggung jawab untuk memimpin dan memantau pelaksanaan harian, termasuk memastikan kordinasi dengan semua benefisiari dan yang lain. PB bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola akuntabilitas keuangan sesuai regulasi dan kebijakan keuangan GAC dan ICRAF. TKP akan melakukan kordinasi mingguan untuk memastikan semua isu cukup tertangani. Seorang Ahli Kesetaraan Gender (AKG) dan Petugas Proyek/Project Officer (PO) akan di bawah supervisi langsung TKP. AKG akan memastikan pelaksanaan dan kegiatan strategi kesetaraan gender serta pencapaian target dari keluaran PK. PO akan mendukung TKP dalam administrasi, untuk bagan organisasi dapat dilihat dibawah ini ;



E. Komite Penasehat Teknis

Komite Penasehat Teknis (KPT) adalah forum untuk mitra pada tingkat nasional yang secara rutin memberi arahan, input dan mendukung dengan pandangan strategis untuk kegiatan pelaksanaan sesuai kebijakan nasional. Tujuan KPT adalah dampak positif yang terukur, sesuai kebutuhan nasional Indonesia, memastikan hasil Land4Lives bisa direplikasi di tempat lain di Indonesia dan diadopsi menjadi produk kebijakan yang menjamin keberlanjutan manfaat proyek di masa depan

No	Lembaga	Jabatan	Posisi	Current Representative
1	Kemementrian BAPPENAS	Ketua	Direktur Pangan dan Pertanian	Ir. R. Anang Noegroho Setyo Moeljono, MEM
2	Global Affair Canada (GAC)	Ketua	Kepala pusat kerjasama	Sherry Hornung
3	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Anggota	Kepala Pusat Instrument Standarisasi untuk Kebencanaalaman dan Perubahan Iklim	Dr. Ir. Kirsfianti Linda Ginoga, M.Sc.
4	Kementrian Pertanian	Anggota	Kepala pusat ketersediaan dan kerawanan pangan	Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP
5	ICRAF	Anggota	ICRAF Country Director	Dr. Sonya Dewi

F. Pembiayaan

Seluruh pembiayaan dalam implementasi proyek Land4lives ICRAF Indonesia bersumber dari Global Affairs Canada dan ICRAF dengan total 18.6 juta CAD.

G. Jadwal Pelaksanaan

Adapun jadwal pelaksanaan program juga dapat dilihat pada lampiran.

BAB III PENUTUP

Demikian RKT ini dibuat seara bersama sama antara Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Bone dan ICRAF Indonesia dengan sebenarnya. Selanjutnya diharapkan agar masing masing pihak dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama sehingga tujuan dari ditandatanganinya Memorandum Saling Pengertian (MSP) ICRAF dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dapat tercapai.

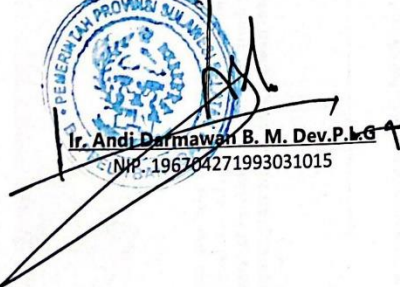
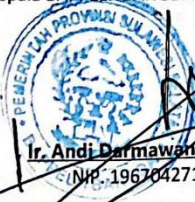
Makassar, 9 Mei 2022

ICRAF Country Director



DR. Sonya Dewi

a.n Gubernur Sulawesi Selatan
Kepala BAPPETBANGDA Prop. Sulawesi Selatan



Ir. Andi Darmawan B. M. Dev. P. L. G.
 NIP. 196704271993031015

a.n. Bupati Bone
kepala BAPPEDA Bone



DR. Ade Fariq Ashar, S.STP, MSI
 NIP. 198501262003121002

Tingkatan Sasaran	Kode	Capaian dan Kegiatan	Pihak yang terlibat	Tahun							
				T1: 2021-2022				T2: 2022-2023			
				K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4
Hasil Jangka Menengah	1100	Menguatnya tata kelola penggunaan lahan dan perumusan kebijakan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, yang memberi manfaat bagi masyarakat miskin dan rentan di provinsi terpilih di Indonesia, serta mengurangi emisi dari penggunaan lahan, alih guna lahan dan hutan (LULUCF)	Badan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perencanaan di tingkat Provinsi dan Kabupaten; Unit Pengelolaan Hutan di tingkat bentang alam; ICRAF-WP1								
Hasil Jangka Pendek	1110	Penguatan kapasitas pemerintah lokal untuk merencanakan dan menerapkan solusi-solusi berbasis alam untuk membangun skema tata guna lahan yang cerdas-iklim, pembangunan yang pro-masyarakat miskin, serta pengelolaan bentang alam dan penghidupan masyarakat yang berkelanjutan dan tanggap gender di tingkat provinsi	Badan-badan Pemberdayaan Perempuan dan Perencanaan di tingkat Provinsi dan kabupaten; ICRAF-WP 1								
aran	1111	Meningkatnya ketersediaan perangkat teknis yang mencakup rencana tata ruang dan pembangunan yang mengarah pada ketahanan pangan, pertanian cerdas-iklim, dan pemberdayaan perempuan	ICRAF WP-1								
aran	1112	Pelatihan dan pendampingan teknis disediakan untuk aparat pemerintah perempuan dan laki-laki, serta anggota dari lembaga mitra dalam hal perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program yang setara gender	ICRAF WP-1								
aran	1113	Dihasilkannya rencana tata guna lahan yang inklusif, terintegrasi dan terinformasikan, yang mengalokasikan produksi vs perlindungan kawasan, menuju mitigasi dan adaptasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari kelompok perempuan dan laki-laki	ICRAF WP-1								

Tingkatan Sasaran	Kode	Capaian dan Kegiatan	Pihak yang terlibat	Tahun							
				T1: 2021-2022				T2: 2022-2023			
				K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4
Hasil Jangka Pendek	1120	Penguatan kapasitas pemerintah provinsi untuk merumuskan kebijakan dan skema pembiayaan yang pro-masyarakat miskin dan tanggap-gender di tiga provinsi yang sejalan dengan tingkat nasional	Badan-badan Pemberdayaan Perempuan dan Perencanaan di tingkat Provinsi dan kabupaten; ICRAF-WP 1								
Luaran	1121	Skema pembiayaan yang inovatif dan responsif-gender untuk tata Kelola bentang alam yang berkelanjutan (transfer fiskal ekologis, Imbal Jasa Lingkungan, dsb.) berhasil diidentifikasi, dikaji dan diakses	ICRAF WP-1								
Luaran	1122	Advokasi kebijakan untuk mengarusutamakan rencana tata guna lahan dan pertumbuhan hijau ke dalam rencana pembangunan dan tata ruang, termasuk ke Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang isinya tanggap-gender	ICRAF WP-1								
Luaran	1123	Sintesis disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai masukan mengenai solusi berbasis alam atas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pertanian cerdas-iklim, dan rencana aksi pangan yang tanggap-gender	ICRAF WP-1								
Hasil Jangka Pendek	1130	Meningkatnya kapasitas pemerintah provinsi dan pemangku kepentingan di tingkat nasional dalam mendiseminasikan informasi dan pengetahuan yang akan memperbaiki bentuk pengelolaan bentang alam oleh petani	Badan-Badan Pemberdayaan Perempuan, Kehutanan dan Perencanaan di tingkat Provinsi dan kabupaten; ICRAF-WP 1								
Luaran	1131	Pelatihan untuk aparat pemerintah provinsi untuk mengorganisasikan dan mendiseminasikan pengetahuan dan informasi mutakhir melalui platform komunikasi terkait akses lahan bagi masyarakat	ICRAF WP-1								

Tingkatan Sasaran	Kode	Capaian dan Kegiatan	Pihak yang terlibat	Tahun							
				T1: 2021-2022				T2: 2022-2023			
				K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4
Luaran	1132	Lokaknya untuk pengelola lahan, khususnya petani perempuan dan laki-laki, mengenai diseminasi informasi mengenai akses lahan, yaitu perhutanan sosial, reforma agraria dan skema lainnya	ICRAF WP-1								
Luaran	1133	Pelatihan tanggap-gender untuk LSM dan kelompok masyarakat, sejalan dengan program pemerintah, yang mengambil upaya mengases kerentanan masyarakat pedesaan terhadap perubahan iklim dan langkah-langkah untuk meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap perubahan iklim	ICRAF WP-1								
Hasil Jangka Menengah	1200	Terbenahnya pengelolaan di tingkat bentang alam oleh pengelola lahan dan pengguna lahan, yang berorientasi pada kesehatan ekosistem yang lebih baik dan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan yang berbeda dari perempuan dan laki-laki di bentang alam prioritas di provinsi-provinsi terpilih	Dinas Kehutanan tingkat Provinsi dan kabupaten; BAPPEDA; ICRAF; CIFOR								
Hasil Jangka Pendek	1210	Meningkatnya keinginan untuk mengembangkan kebijakan dan program restorasi hutan dan bentang alam yang dapat membuka partisipasi dari kelompok rentan, khususnya perempuan	Dinas Kehutanan tingkat Provinsi; BAPPEDA; KPH; ICRAF; CIFOR								
Luaran	1211	Area prioritas untuk perlindungan, produksi dan restorasi hutan dan bentang alam diidentifikasi dan dipetakan melalui proses yang partisipatif dan setara gender	ICRAF WP-2; CIFOR								
Luaran	1212	Asesmen setara-gender terkait dengan perangkat dan pilihan untuk menghindari deforestasi dan degradasi lahan dan hutan, termasuk investasi hijau untuk komoditas yang dikelola secara setara oleh perempuan dan laki-laki	ICRAF WP-2; CIFOR								
Luaran	1213	Panduan implementasi restorasi hutan dan bentang alam dengan pendekatan setara gender direkomendasikan kepada pemerintah provinsi	ICRAF WP-2; CIFOR								

Tingkatan Sasaran	Kode	Capaian dan Kegiatan	Pihak yang terlibat	Tahun							
				T1: 2021-2022				T2: 2022-2023			
				K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4
Hasil Jangka Pendek	1220	Meningkatnya kesadaran akan sumber air dan Daerah Aliran Sungai (DAS) di antara perempuan dan laki-laki untuk 6 bentang alam terpilih	Dinas Kehutanan Provinsi dan kabupaten; Forum DAS; BAPPEDA; BPDAS; ICRAF; CIFOR								
Luaran	1221	Analisis fungsi DAS, kapasitas penyangga, potensi ancaman dari erosi tanah, sedimentasi, longsor dan banjir melalui konsultasi dengan perempuan dan laki-laki	ICRAF WP-2								
Luaran	1222	Perancangan bersama (co-design) yang setara gender mengenai infrastruktur hijau dan solusi berbasis alam, penggunaan air yang efisien, retensi karbon, konservasi keanekaragaman hayati dan tanah di bentang alam prioritas	ICRAF WP-2								
Luaran	1223	Pelatihan dan fasilitasi yang setara-gender disediakan untuk pemerintah lokal, sektor swasta, kelompok petani dan kelompok yang rentan untuk pemanenan air hujan secara efisien dan solusi berbasis alam	ICRAF WP-2								
Hasil Jangka Menengah	1300	Dikuatkannya bentuk penghidupan masyarakat yang tahan terhadap perubahan iklim dan dikuatkannya ketahanan pangan untuk masyarakat miskin dan rentan, khususnya perempuan	Dinas Kehutanan tingkat Provinsi dan kabupaten; Kantor Pertanian tingkat Provinsi dan kabupaten; kelompok tani tingkat Desa; ICRAF								
Hasil Jangka Pendek	1310	Dikuatkannya akses rumah tangga tani, khususnya yang secara sosio-ekonomi tidak diuntungkan, terhadap skema pembiayaan yang inovatif dan sensitif gender, serta rantai nilai dan pasar hijau di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan NTT	ICRAF; mitra pemasaran dan pembiayaan keuangan lokal								

Tingkatan Sasaran	Kode	Capaian dan Kegiatan	Pihak yang terlibat	Tahun							
				T1: 2021-2022				T2: 2022-2023			
				K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4
Luaran	1311	Kasus-kasus bisnis berbasis wanatani yang inovatif dan terintegrasi, dengan perhatian khusus pada usaha yang dipimpin oleh perempuan atau untuk komoditas yang dikelola oleh sebagian besar perempuan, termasuk kemitraan barbagi-nilai dengan sektor swasta	ICRAF WP-3								
Luaran	1312	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petani, khususnya perempuan dan kelompok yang dipimpin perempuan, khususnya terkait akses terhadap instrumen pembiayaan inovatif	ICRAF WP-3								
Luaran	1313	Pengembangan pendanaan inovasi yang fokus secara lokal (asuransi panen dan pasar) untuk para petani, khususnya perempuan dan kelompok perempuan	ICRAF WP-3								
Hasil Jangka Pendek	1320	Meningkatnya pengetahuan rumah tangga tani, khususnya rumah tangga miskin dan yang dikepalai perempuan, atas pertanian cerdas-iklim	ICRAF; Mitra teknis								
Luaran	1321	Dihasilkannya materi-materi sensitif gender terkait Good Agricultural Practice (GAP) dari komoditas wanatani untuk petani perempuan dan laki-laki	Tim lapangan tingkat provinsi dan kabupaten; ICRAF								
Luaran	1322	Plot demonstrasi dari pertanian cerdas-iklim dan tanggap gender, termasuk wanatani dan paludikultur, yang dibangun bersama dan untuk petani perempuan dan laki-laki	Tim lapangan tingkat provinsi dan kabupaten; ICRAF								
Luaran	1323	Lokasi demonstrasi di hutan dan lahan gambut yang dikelola bersama oleh petani perempuan dan laki-laki, pemerintah, dan LSM	Tim lapangan tingkat provinsi dan kabupaten; ICRAF								
Hasil Jangka Pendek	1330	Meningkatnya pengetahuan tentang sumber pangan lokal yang sehat dan bergizi, serta meningkatnya asupan gizi untuk semua anggota masyarakat, khususnya perempuan dan anak-anak	Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan kabupaten, Mitra Pemberdayaan Perempuan; ICRAF; CIFOR								

Tingkatan Sasaran	Kode	Capaian dan Kegiatan	Pihak yang terlibat	Tahun							
				T1: 2021-2022				T2: 2022-2023			
				K1	K2	K3	K4	K1	K2	K3	K4
Luaran	1331	Kampanye penyadartahuan yang sensitif gender dan usia terkait dengan pangan dan pola konsumsi sehat, serta akses setara dari sistem produksi pangan lokal	Tim ketahanan Pangan lapangan; ICRAF; CIFOR								
Luaran	1332	Disediakannya pendampingan teknis, khususnya untuk rumah tangga dari kelompok yang secara sosio-ekonomi tidak diuntungkan, untuk membahas hambatan dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi	Tim lapangan tingkat provinsi dan kabupaten; ICRAF; CIFOR								
Luaran	1333	Difasilitasi pengembangan program pemerintah yang setara gender untuk secara efektif menyentuh isu-isu ketahanan pangan dan gizi yang memperhatikan aspek diferensiasi gender	Tim ketahanan Pangan lapangan; ICRAF; CIFOR								

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan **Herawaty D, S.Sos., M.M** Staff Bagian Dekonsentrasi, Tugas Pembantu, dan Kerjasama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Tata Usaha



Wawancara dengan **Muhammad Syahrir**, Koordinator ICRAF Provinsi Sulawesi Selatan



Wawancara dengan **Ibu Andi Ambaru Keteng, S.Sos, M.Si**, dari Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan



Wawancara dengan Ibu **Arista Asrib, S.IP** dari Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan



Wawancara dengan **Ir. Andi Hendra Setiawan, SPt., M.Si., IPM**
selaku Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone



Wawancara dengan **Andi Habibie, St, M.Si** selaku Kepala Bidang tata Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone